

## **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

**Fauziyah Nur'Aini\*, Elly Halimatusadiah**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fauziyahnuraini12@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

**Abstract.** Tax avoidance is an effort made legally by taxpayers in reducing the tax burden borne by exploiting the weaknesses contained in the law that has been determined. This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership, the proportion of independent commissioners, and audit committees on tax avoidance. The research method used in this research is to use the verification method with a quantitative approach. The population in this study are manufacturing companies in the consumer goods sector and basic & chemical industries listed on the Indonesian stock exchange in 2018-2020. The sample selection in this research is by using purposive sampling method. The data used in this study is secondary data obtained from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) The data collection technique in this study is the documentation technique. The research data were analyzed using multiple regression analysis using SPSS 23. The test results show that institutional ownership, managerial ownership, and the proportion of independent commissioners have a significant negative effect on tax avoidance, while the audit committee has no significant effect on tax avoidance.

**Keywords:** *Audit Committee, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Tax Avoidance.*

**Abstrak.** Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi dan industri dasar & kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 23. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Penghindaran Pajak.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi ataupun perusahaan. Pajak adalah pendapatan yang besar dan penting bagi negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan. Tetapi untuk perusahaan, pajak adalah beban yang dapat memotong keuntungan mereka. Karena kepentingan pajak yang saling bertentangan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mencoba menurunkan tingkat pajak yang masih harus dibayar, baik secara legal ataupun ilegal. Salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Pohan [1] menyatakan bahwa “penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar”. Penghindaran pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan atau perusahaan karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri.

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara langsung melanggar hukum. Praktik perpajakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya dimaksudkan untuk mengurangi apa yang dianggap sebagai kewajiban perpajakan yang sah. Di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam rangka menekan pembayaran pajak. Modusnya yaitu dengan melapor bahwa perusahaan rugi sehingga dapat menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan skema penghindaran pajak tersebut. Namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat berkembang bahkan berekspansi. Fenomena penghindaran pajak yang ramai dibicarakan dan membuat gempar masyarakat adalah adanya kasus *pandora papers*, di mana wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan-perusahaan melindungi atau menyembunyikan kekayaannya dengan mendirikan perusahaan cangkang di negara surga pajak. Salah satu caranya dengan menyimpan atau mengalihkan hartanya ke negara surga pajak. Mendirikan perusahaan cangkang di negara surga pajak bukan suatu tindakan yang melanggar hukum, namun dipandang negatif karena seringkali digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi gelap, salah satunya penghindaran pajak. Karena banyaknya wajib pajak orang maupun perusahaan yang tidak melaporkan keuntungannya yang dapat mengakibatkan adanya keterbatasan data untuk mengakses informasi perpajakan [2]

Perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat mempengaruhi penurunan pendapatan suatu negara dan bagi perusahaan dapat mengakibatkan jatuhnya suatu hukuman yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara manajer atau agent dengan berbagai kepentingan yang berkepentingan dengan baik atau buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, salah satunya mengenai perpajakan [3]

Tata kelola perusahaan memiliki peranan yang penting dalam perusahaan, salah satunya yaitu sebagai mekanisme struktur dan sistem yang dapat mendorong kepatuhan pihak manajemen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, contohnya dalam melakukan pembayaran pajak. Perusahaan yang memenuhi pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa terdapat tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan.

Mekanisme struktur tata kelola perusahaan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan baik oleh pihak institusi maupun pihak manajemen dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan saham memiliki peranan yang penting dalam perusahaan yaitu untuk memonitor setiap keputusan yang akan diambil oleh para pemimpin, sehingga keputusan yang diambil akan efektif.

Dewan komisaris independen dan komite audit juga memiliki peran yang tidak kalah

penting dalam perusahaan. Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting, karena dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang bertugas untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Sebagai komite yang dibuat oleh dewan komisaris independen, komite audit mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan serta membantu dewan komisaris, sehingga manajemen dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, serta dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan di dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 pada sektor barang konsumsi dan sektor industri dasar & kimia.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu nonprobability sampling dengan purposive sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan. Data sekunder digunakan sebagai sumber inti dari penelitian ini dengan memperoleh data secara digital pada website resmi perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Software SPSS versi 23 menjadi alat untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak paling penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan karena sifatnya sebagai pemegang saham utama, selain itu merupakan pihak yang dapat mengontrol pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan. Pengawasan oleh investor institusional akan memastikan kemakmuran pemegang saham. Pengaruhnya dapat dilihat dalam investasi besar mereka di pasar modal. Kepemilikan institusional adalah salah satu struktur tata kelola perusahaan yang paling penting. Kepemilikan institusional adalah hasil kepemilikan saham sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: (Nadirsyah & Muharram, 2015):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan perusahaan. hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Kepemilikan manajerial memegang peranan penting dalam suatu perusahaan karena manajer ikut serta dalam kepemilikan saham di perusahaan. Adanya proporsi kepemilikan saham manajemen membuat manajemen terlibat langsung dalam setiap keputusan perusahaan. Kepemilikan manajemen mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, diukur sebagai persentase dari saham yang dimiliki. (Anita & Yulianto, 2016) yang diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan gambaran teratas dari sistem pengendalian perusahaan. Peran pengawasan dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir konflik keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Dewan komisaris independen mengacu pada jumlah komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham perusahaan dan bertindak independen untuk

kepentingan perusahaan. BEI menetapkan bahwa setiap emiten harus memiliki minimal 30% dewan pengawas independen, agar dapat melakukan pengawasan secara efektif. Jumlah anggota independen dihitung dengan membagi jumlah anggota independen dengan keseluruhan jumlah dewan komisaris, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

**Komite Audit**

Komite audit merupakan bagian penting dari suatu perusahaan yang harus ada karena tugasnya adalah untuk mengawasi dan mengontrol penyusunan laporan keuangan perusahaan agar tidak terjadi tindakan kecurangan oleh semua pihak dalam perusahaan. Komite audit harus dapat mengawasi bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen adalah benar, yang berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pemangku kepentingan perusahaan. Komite audit harus bertindak secara independen karena komite audit adalah jembatan antara auditor eksternal dan perusahaan serta dewan direksi dengan auditor internal. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan pengawas untuk membantu pemenuhan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasannya di dalam perusahaan. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit di perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah anggota komite audit di perusahaan}$$

**Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar (Pohan, 2017). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis, sehingga mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Dalam perusahaan multinasional penghindaran pajak dilakukan dengan cara memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan khusus yaitu negara surga pajak. Pengukuran untuk penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan ETR. Effective Tax Rate (ETR) merupakan perhitungan yang berdasarkan pelaporan keuangan yang berlaku, dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 1.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.381	.035			10.857	.000		
KI	-.007	.002	-.609		-3.963	.000	.715	1.398
KM	-.009	.004	-.333		-2.324	.025	.821	1.218
DKI	-.131	.040	-.526		-3.308	.002	.669	1.495
KA	-.007	.005	-.189		-1.429	.161	.968	1.033

a. Dependent Variable: PP

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini adalah persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini:

$$Y = 0.381 - 0.007X_1 - 0.009X_2 - 0.131X_3 - 0.007X_4 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.381 artinya jika variabel KI, KM, DKI, dan KA nilainya adalah 0, maka variabel PP mengalami kenaikan sebesar 0.381.

2. Koefisien Regresi  $b_1 X_1$   
Nilai koefisien regresi KI sebesar -0.007 artinya jika variabel KI meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya konstan, maka PP akan menurun sebesar 0.007.
3. Koefisien Regresi  $b_2 X_2$   
Nilai koefisien regresi KM sebesar -0.009 artinya jika variabel KM meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya konstan, maka PP akan menurun sebesar 0.009.
4. Koefisien Regresi  $b_3 X_3$   
Nilai koefisien regresi DKI sebesar -0.131 artinya jika variabel DKI meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya konstan, maka PP akan menurun sebesar 0.131.
5. Koefisien Regresi  $b_4 X_4$   
Nilai koefisien regresi KA sebesar -0.007 artinya jika variabel KA meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya konstan, maka PP akan menurun sebesar 0.007.

## Uji F

**Tabel 2.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.013	4	.003	4.801	.003 <sup>b</sup>
	Residual	.026	40	.001		
	Total	.039	44			

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), KA, KM, KI, DKI

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu KI, KM, DKI, dan KA secara bersama-sama akan berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Uji t

**Tabel 3.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.381	.035		10.857	.000
	KI	-.007	.002	-.609	-3.963	.000
	KM	-.009	.004	-.333	-2.324	.025
	DKI	-.131	.040	-.526	-3.308	.002
	KA	-.007	.005	-.189	-1.429	.161

a. Dependent Variable: PP

Untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel dapat dilihat dari hasil uji t. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai signifikan variabel KI sebesar 0.000, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel KI berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.
2. Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai signifikan KM sebesar 0.025 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel KM berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.
3. Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai signifikan DKI sebesar 0.002 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DKI berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.
4. Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai signifikan KA sebesar 0.161 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan

bahwa variabel KA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4.** Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.570 <sup>a</sup>	.324	.257	.02555	.324	4.801	4	40	.003

a. Predictors: (Constant), KA, KM, KI, DKI

Untuk mengetahui seberapa besar total pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui hasil uji koefisien determinasi R-Square. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0.324. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh KI, KM, DKI, dan KA terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 32.4%, sedangkan sisanya sebesar 67.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.003 yang artinya lebih kecil dari 0.05, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.324 atau 32.4%, yang berarti bahwa pengaruh KI, KM, DKI, dan KA terhadap penghindaran pajak adalah 32.4%, sedangkan sisanya 67.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti terkait pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
3. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

### Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT serta semua orang yang terlibat dan ikut membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini kedua orang tua peneliti, dosen pembimbing Ibu Elly Halimatusadiah, SE, M.Si, Ak, CA dan tidak lupa kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti.

### Daftar Pustaka

- [1] Anita, A., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Management Analysis Journal*.
- [2] Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3.
- [3] KNKG. (2014). Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia.

- [4] Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- [5] Mulyani, S. (2017, Mei 29). *KumparanNews*. Retrieved from *Kumparan.com*: <https://kumparan.com/kumparannews/sri-mulyani-di-depan-komisi-xi-semakin-banyak-orang-menghindari-pajak>
- [6] Nadirsyah, & Muharram, F. N. (2015). Struktur Modal, Good Corporate Governance dan Kualitas Laba. *Jurnal Dinamika dan Bisnis*.
- [7] Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Suyono, E. (2016). Family controlled firm, governance mechanisms and corporate performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*.
- [9] Watch, I. C (2021, Oktober 12). *Antikorupsi.org*.article. Retrieved from *Antikorupsi.org*: <https://www.antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius>
- [10] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 1(1). 59-65